

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Mahasiswa**

##### **2.1.1. Definisi Mahasiswa**

Mahasiswa merupakan sosok individu yang berada batas usia 18-30 tahun serta mereka resmi terdaftar guna mengikuti pelajaran di perguruan tinggi. Mahasiswa juga merupakan kelompok di dalam masyarakat dengan status yang diperoleh karena adanya ikatan dengan sebuah perguruan tinggi (Sarwono S. W., 1978). Mahasiswa juga dapat dikatakan sebagai insane-insan calon sarjana yang memiliki keterlibatan dalam perguruan tinggi, sehingga mampu menyatu dengan masyarakat dan diharapkan menjadi calon-calon intelektual (Knopfemacher, dalam Suwono, 1978).

##### **2.1.2. Faktor Penyebab Pergerakan Mahasiswa**

Altbach (1989), menjelaskan beberapa fenomena terkait bagaimana mahasiswa mampu melakukan pergerakan politik:

1. Negara dunia ketiga memiliki kekurangan dalam lembaga serta struktur politik yang fundamental sebagaimana yang dapat dilihat pada negara-negara industri. Dalam hal ini komunitas mahasiswa memiliki keuntungan dalam hal kerapuhan berorganisasi dan mengorganisir, sehingga mampu terjun dan memiliki dampak atas politik yang ada.

2. Mahasiswa diharapkan langsung ikut dalam berpartisipasi dalam politik. Mahasiswa atau pemuda sudah terlibat dalam gerakan kemerdekaan sejak awal berdirinya sebuah negara dan menjadi bagian dari sistem politik.
3. Mahasiswa merupakan kelompok elit minoritas dimana mereka memiliki perasaan yang diistimewakan. Karena mahasiswa merupakan individu yang melanjutkan pendidikan pasca Sekolah Menengah Atas serta memiliki memiliki kesempatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang biasa dalam akses pendidikan serta kesempatan akses ke dalam posisi kekuasaan.
4. Lokasi universitas di negara dunia ketiga banyak berporos di ibu kota. Hal ini memberikan kesempatan bagi para mahasiswa untuk melakukan suatu kegiatan. Demonstrasi-demonstrasi dapat dilakukan dengan lebih terorganisir karena mereka merasa berada di pusat kekuasaan dan memiliki akses untuk hal itu.
5. Mahasiswa mampu menjadi penyambung lidah rakyat dalam menyuarakan populasi yang lebih luas. Mahasiswa mampu melakukan pergerakan yang nampaknya kecil, tetapi memiliki efektivitas yang tinggi. Hal ini dapat memobilisasi gerakan sosial yang lebih besar dan cepat serta memberikan dampak yang besar bagi pemerintahan.

Indonesia sendiri memang tidak murni menyandang gelar negara dunia ketiga, karena sekarang sedang bertransformasi menjadi negara berkembang. Hal ini menjadikan gerakan mahasiswa juga mengalami perubahan dalam tujuan mereka tidak lagi mengurus masalah politik saja, akan tetapi juga mulai menggarap isu

lingkungan hidup, HAM (Hak Asasi Manusia), dan lain-lain. Selain itu juga banyak cara baru dalam pengorganisasian yang dilakukan dalam menjalankan sebuah aksi aktivisme (Kusumah, 2007).

### **2.1.3. Hubungan Mahasiswa dengan Aktivisme**

Nasionalisme menjadi sebuah kekuatan utama dalam mendorong hadirnya aktivisme selama periode kolonial di benua Afrika dan Asia. Secara virtual, setiap perjuangan dengan menggunakan nasionalisme serta kemerdekaan di dalamnya terdapat komponen yang kuat, yaitu partisipasi para cendekiawan muda yang kuat. Perkembangan konsep berkebangsaan yang ada di Indonesia serta keinginan dalam pergerakan nasional muncul dari sekelompok intelektual siswa dan mampu dijadikan sebagai dasar bagi perjuangan nasionalis yang sukses (Altbach, *Perspectives on Student Political Activism*, 1989).

Perbedaan pendapat dalam diri mahasiswa merupakan pusat dari politik dan sejarah modern Indonesia. Selama berjalannya periode kolonial awal tahun 1920-an, mahasiswa merupakan tokoh kunci dalam membuat gerakan nasionalis anti-kolonial. Pada tahun 1949 pasca kemerdekaan, universitas negeri di Indonesia mengalami peningkatan dalam pendaftaran siswa regional dan peningkatan aktivitas politik yang dipicu oleh perekrutan partai politik. Dilanjutkan pada sekitar tahun 1960-an, saat itu aktivisme mahasiswa merupakan kekuatan global dalam melakukan kritik terhadap “sayap kiri” tentang kekuasaan dan perang negara, mahasiswa Indonesia terlibat dalam kampanye dengan kekerasan terhadap “sayap kiri” – Partai

Komunis Indonesia (PKI) – dan mendukung munculnya pemerintahan militer pada saat itu (Sapiie, 2016).

Aktivisme politik mahasiswa merupakan fenomena yang memiliki banyak dimensi. Ada banyak variasi yang diakibatkan oleh keadaan historis, tingkat perkembangan sosial-politik dan pendidikan. Sebuah gerakan yang efektif bergantung kepada faktor eksternal untuk mensukseskannya, seperti media dan kekuatan dari pengaruh serta legitimasi gerakan aktivis itu sendiri. media massa terkadang memberikan perhatian pada gerakan aktivis dan tuntutan mahasiswa, sementara di lain waktu politik mahasiswa belum banyak mendapat publisitas. Fokus media lebih besar jika terjadi gejolak sosial di dalam masyarakat itu sendiri (Altbach, *Perspectives on Student Political Activism*, 1989).

Jaringan dukungan komunal untuk solidaritas dan aksi sangat penting untuk kelangsungan atau keberlangsungan kampanye aktivis kampus (Rhoads, 1998). Dalam berjalannya sebuah gerakan aktivisme, kelompok-kelompok protes haruslah memobilisasi sumber dayanya dengan baik untuk mendukung sebuah taktik, untuk memberikan penawaran para peserta untuk ikut serta dan untuk menyediakan struktur komunikasi yang mampu memfasilitasi dalam konteks gerakan yang lebih besar (McAdam, 1983).

Cara dalam membentuk sebuah komunikasi dalam proses aktivisme terus berkembang. Soule (1997), memberikan gambaran terkait kelompok-kelompok demonstran mahasiswa di berbagai kampus. Dia menemukan bahwa kelompok

aktivis berbasis kampus tidak beroperasi secara terpisah, sebaliknya mereka terus-menerus saling melakukan pemantauan secara langsung dan tidak dalam memobilisasi dukungan, mengumpulkan sumber daya dan memberikan solidaritas.

## **2.2. Cyberactivism**

### **2.2.1. Definisi *cyberactivism***

Howard (2011), mendefinisikan *cyberactivism* sebagai tindakan menggunakan internet untuk memajukan penyebab politis yang sulit untuk dicapai secara *offline*. Tujuan dari *cyberactivism* juga sering untuk menciptakan berkas digital yang menarik secara intelektual dan emosional dalam menceritakan sebuah ketidakadilan, menafsirkan sejarah, dan mengadvokasi untuk hasil politik tertentu. Perilaku ini berbeda dengan mobilisasi karena berfokus pada perencanaan pelaksanaan, dan fasilitasi tindakan. Akan tetapi keduanya saling terikat erat, karena *cyberactivism* dapat membantu memberikan dorongan dan mempromosikan keterlibatan sipil yang pada akhirnya juga akan melahirkan berbagai macam bentuk mobilisasi.

Definisi lain dari *cyberactivism* dikemukakan oleh Langman, dkk., (2003), yaitu penggunaan luas dari internet untuk memberikan informasi yang berlawanan dan menginspirasi mobilisasi sosial. Terdapat berbagai macam jenis-jenis *cyberactivism* berkisar dari menandatangani petisi *online* untuk terlibat dalam *hacktivism*. *Cyberactivism* juga dapat didefinisikan sebagai aktivisme sosial yang dibantu oleh atau berdasarkan pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi

dan internet (Akin, 2011). Berdasarkan Langman, dkk., (2003) *cyberactivism* dimungkinkan untuk mengelompokkan pengguna internet di bawah empat kelompok, yaitu :

1. Pertama, adalah penggunaan teknologi ini untuk memperluas kelompok, merekrut anggota, dan mengoordinasikan kegiatan dan gerakan organisasi.
2. Kedua, teknologi ini dapat digunakan untuk menghasilkan liputan media untuk kelompok yang tidak memiliki liputan media *mainstream*.
3. Ketiga, teknologi ini menciptakan ruang public virtual dimana pesertanya dapat mempraktikkan demokrasi.
4. Keempat, *hacktivism* dimana tindakan meretas ke dalam sistem komputer untuk tujuan politik atau sosial, penggunaan yang lain dapat juga membantu aktivis untuk mengganggu atau memanipulasi teknologi internet untuk memenuhi tujuan politik.

*Cyberactivism* dipandang sebagai hal yang penting menuju perubahan sosial yang progresif. Penting untuk mempelajarinya sebagai bagian dari *social movement organizations*, karena di dalamnya juga memiliki efek yang sentimental pada politik, transformasi sosial, perubahan sosial dan teori gerakan sosial (McCaughey & Ayers, 2003). *Cyberactivism* dilihat sebagai alat perubahan dan demokrasi, karena kemampuannya untuk menjangkau para aktor penting yang ada di seluruh dunia. Hal ini terjadi berkat tidak adanya batasan geografis apa pun, ia mempromosikan gagasan

untuk menciptakan ruang publik virtual dimana dimungkinkan untuk mengejar tujuan politik tanpa kendala apapun.

Momen berpengaruh penggunaan teknologi internet dalam aktivisme global adalah sebagai liputan media dan komunikasi. Hal ini terjadi dikarenakan *social movement organizations* (SMOs) membutuhkan liputan media untuk mengirimkan pesan mereka ke khalayak yang lebih luas (Smith, McCharty, McPhail, & Augustyn, 2001). Literatur *cyberactivism* dan internet tidak hanya penting untuk dipahami sebagai fenomena semata, tetapi juga akan meningkatkan pemahaman terkait globalisasi dan gerakan sosial.

### **2.2.2. Karakteristik *cyberactivism***

Terdapat banyak tokoh yang memberikan pandangannya terkait karakteristik dari *cyberactivism*, yang pertama menurut Lemos (2003), menyajikan bahwa tiga kategori besar *cyberactivism*:

1. Kesadaran dan informasi, seperti kampanye yang dipromosikan oleh *Amnesty International*, *Greenpeace*, atau *Human Right Telematic Network*.
2. Organisasi dan mobilisasi, hal ini terjadi di seluruh lingkup internet guna mendukung tindakan tertentu (undangan untuk tindakan nyata yang akan dilakukan).
3. Inisiatif yang dikenal sebagai *hacktivism*, tindakan jaringan yang melibatkan banyak jenis tindakan elektronik, seperti pengiriman masal *e-mail*, penandatanganan petisi dan pemblokiran akses melalui *DoS (Denial of Service)*.

Selanjutnya Edward (2004), yang meneliti bagaimana internet mendukung infrastruktur organisasi dalam konteks gerakan perempuan Belanda. Dia mengusulkan model yang menggambarkan bahwa penggunaan internet dapat dijelaskan oleh interaksi tiga faktor dalam konteks politik, termasuk:

1. Orientasi tujuan organisasi, fungsi yang ingin dicapai organisasi dengan melakukan gerakan, dan struktur internal organisasi. Melalui tiga karakteristik diatas, suatu organisasi memutuskan untuk menggunakan tindakan yang sesuai untuk mencapai tujuannya (termasuk penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi).
2. Ketersediaan sumber daya, merujuk kepada rendahnya biaya membuat situs web, yang kemudian memiliki kegunaan lebih lanjut dalam penyediaan konten yang mendukung suatu gerakan.
3. Persepsi organisasi tentang peluang internet, merujuk pada berbagai potensi penggunaan internet untuk memfasilitasi berfungsinya organisasi.

Model Edward (2004) ini menunjukkan bagaimana sebuah organisasi mengembangkan penggunaan internet mereka berdasarkan tiga karakteristik diatas, yang mana nantinya diharapkan berdampak pada gerakan sosial.

Beberapa karakteristik dalam organisasi virtual adalah akses yang bebas, tidak ada moderasi, tidak ada aturan untuk masuk, tidak ada kepemimpinan, alur informasi yang bebas, dan diskusi dilakukan secara online (Sandoval-Almazan & Gill-Garcia,



2013). Organisasi yang melakukan gerakan online setidaknya memiliki karakteristik bersifat horizontal (non-struktural) dan desentralisasi (Jamie & Kenneth, 2009).

### **2.2.3. Jenis-Jenis *Cyberactivism***

Dari beberapa jurnal disebutkan bahwa *cyberactivism* memiliki beberapa cara, antara lain:

#### 1. *Clicktivism/ Slacktivism*

Terdapat berbagai macam cara untuk ikut berpartisipasi terkait alat media sosial yang tersedia dalam spektrum ekologi web, seperti membuat koneksi, menambahkan komentar, menandai foto dan video, berbagi informasi, dan mengungkapkan pendapat dapat membuat individu terlibat dalam kegiatan politik ataupun sosial (Mora, 2013).

#### 2. *Hacktivism*

*Hacktivism* atau biasa disebut peretasan dapat digunakan untuk merujuk pada kegiatan entitas yang disponsori oleh pemerintah, kelompok kriminal yang mencari akses informasi *online* untuk mendapat keuntungan, atau pemrotes mengambil tindakan dunia maya sebagai tanggapan terhadap masalah yang menjadi perhatian (Cumming, 2017).

#### 3. Petisi *Online*

Pada dasarnya petisi *online* adalah bentuk partisipasi politik yang menjadi jembatan penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Di sisi lain bentuk

partisipasi politik ini juga dapat ditujukan kepada kepentingan sosial. Pengaruh petisi *online* terhadap suatu masalah adalah sebuah solusi dalam pelaksanaan advokasi kebijakan, argumentasi serta saran publik yang akan langsung tersampaikan kepada target yang dituju (Lindner & Riehm, 2011).

#### 2.2.4. Batasan *Cyberactivism*

Illia (2003), menjabarkan apa batasan antara aktivisme dengan *cyberactivism* sebagai berikut:

No.	<i>Activism</i>	<i>Cyberactivism</i>
1.	Berasal dari kompleksitas dan pluralism masyarakat.	Berasal dari peningkatan kompleksitas masyarakat yang disebabkan hilangnya kontrol komunikasi dalam jaringan yang jamak.
2.	Berasal dari heterogenitas masyarakat.	Berasal dari heterogenitas yang lebih besar karena dua karakteristik internet: agensi dan mutabilitas.
3.	Tumbuh dari pemilihan masalah yang disebabkan oleh harapan yang gagal terkait <i>corporate social responsibility</i> (CSR).	Tumbuh dari pemilihan isu yang disebabkan oleh harapan yang gagal terkait dengan opini publik yang bertanggung jawab sehubungan dengan CSR atau non-CSR.
4.	Ada kecenderungan untuk bangkit dan fokus pada suatu masalah. Pemilihan masalah memiliki logika fungsional yang dibatasi oleh batas teritorial.	Ada kecenderungan untuk bangkit dan fokus pada suatu masalah. Pemilihan masalah memiliki logika fungsional yang diberdayakan oleh logika fungsional pengembangan masalah melalui media digital/internet.
5.	Aktivisme terdiri dari protes terhadap dua atau lebih individu. Agregasi ke dalam sekelompok orang adalah hak prerogatif aktivisme.	<i>Cyberactivism</i> terdiri protes terhadap satu individu atau dua atau lebih. Agregasi bukan hak prerogatif <i>cyberactivism</i> .

- |   |  |
|---|--|
| <p>6. Aktivisme mengekspresikan dan mencapai situasi tekanan pada suatu perusahaan menjadi gerakan protes atau organisasi. Tekanan pada perusahaan/pemerintahan dicapai dalam agregasi.</p> | <p><i>Cyberactivism</i> mengungkapkan dalam agregasi spontan, tindakan individu, gerakan protes yang terjadi diluar dan di internet, dan organisasi yang beroperasi diluar dan di internet. Tekanan terhadap perusahaan/pemerintahan tercapai dalam setiap hubungan tunggal.</p> |
| <p>7. Visibilitat tercapai karena liputan media massa yang berkontribusi terhadap peningkatan tekanan.</p>  | <p>Visibilitas dicapai melalui media massa dan internet. Keduanya berkontribusi untuk mendapatkan visibilitas, tetapi hasil kebijakan publik hanya dapat dicapai jika ada liputan media massa.</p>   |
- 

### **2.3. Theory of Planned Behavior (TPB)**

#### **2.3.1. Sejarah Theory of Planned Behavior (TPB)**

*Theory of Planned Behavior* merupakan hasil pengembangan dari teori intensi yang juga dirumuskan oleh Ajzen dan Fishbein, yaitu *Theory of Reasoned Action* (TRA). TRA sendiri merupakan teori intensi yang memiliki pendapat bahwa perilaku manusia yang dimunculkan adalah hasil dari intensi seseorang untuk melakukan perilaku tertentu (Conner & Norman, 2003). Intensi merupakan sebuah faktor motivasional seseorang yang berindikasi sebera besarnya usaha seseorang untuk mencapai suatu perilaku tertentu. TRA berpendapat bahwa intensi adalah sebuah fungsi dari sikap seseorang terkait perilaku tertentu serta norma subjektifnya terhadap perilaku yang akan dituju tersebut (Caulfield, 2007). Dalam model ini, intensi ditentukan melalui dua faktor, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*) dan norma subjektif (*subjective norms*). Sikap terhadap perilaku mengacu

kepada bagaimana individu melakukan evaluasi terhadap perilaku tertentu, sedangkan norma subjektif merupakan keyakinan individu terhadap bagaimana orang-orang tertentu yang memiliki peran penting berpikir bahwa individu melakukan perilaku tersebut atau tidak. TRA dibentuk dengan keyakinan bahwa sebagian perilaku yang ditunjukkan individu sebagian dikontrol oleh intensi (Conner & Norman, 2003).

TRA memberikan batasan dalam teorinya dengan perilaku yang berada dibawah kehendak individu yang bersangkutan (*volitional behaviors*), sementara perilaku yang membutuhkan sumber daya, kemampuan, dan kesempatan yang tidak tersedia secara bebas tidak menjadi pertimbangan (Conner & Norman, 2003). Selanjutnya, TPB merupakan teori yang dikembangkan dengan menggunakan aplikasi dari TRA dalam perilaku yang tidak sepenuhnya berada dalam kontrol kehendak individu (*non-volitional behaviors*), dengan menyertakan prediktor ketiga, yaitu *perceived behavioral control*. Prediktor ini dijelaskan sebagai penilaian individu mengenai seberapa besar kontrol yang dapat dimiliki terhadap suatu perilaku. Persepsi akan kontrol mengacu kepada kemampuan seseorang untuk melakukan perilaku tertentu (Conner & Norman, 2003).

### **2.3.2. Definisi *Theory of Planned Behavior* (TPB)**

*Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan teori yang digunakan untuk memperidiksi perilaku seseorang. Ajzen (1991) menyebutkan faktor inti dari teori ini adalah intensi individu guna melakukan perilaku tertentu. Bandura (2001), menyatakan bahwa intensi merupakan tekad dalam diri individu untuk melakukan

aktivitas dan menghasilkan suatu keadaan tertentu. Intensi dalam teori ini diasumsikan sebagai faktor yang memberikan motivasi kepada individu untuk melakukan perilaku tertentu, intensi juga mampu mengindikasikan seberapa besar seseorang mengeluarkan usaha untuk memunculkan perilaku tertentu (Ajzen, *The theory of planned behavior*, 1991). Intensi merupakan salah satu prediktor penting dalam merepresentasikan kesiapan individu guna memunculkan perilaku dan dianggap sebagai anteseden dari munculnya perilaku tertentu (Caulfield, 2007).

### **2.3.3. Determinan *Theory of Planned Behavior* (TPB)**

Ajzen (1991), disebutkan dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) terdapat tiga prediktor independen dari intensi, yaitu:

1. Sikap terhadap perilaku (*Attitude toward behavior*)

Ajzen (2005), mengatakan sikap merupakan suatu titik tengah individu dalam memberi respon apakah akan positif atau negatif suatu perilaku. Sikap terhadap perilaku dapat ditentukan oleh *belief* tentang konsekuensi dari sebuah perilaku, yang biasa disebut dengan *behavioral beliefs*. Selanjutnya Ajzen (2005), mengungkapkan bahwa setiap *behavioral beliefs* mampu menghubungkan perilaku dengan hasil yang didapatkan dari suatu perilaku. Sikap terhadap perilaku dapat ditentukan melalui proses evaluasi individu mengenai hasil yang berhubungan dengan perilaku dengan kekuatan hubungan dari kedua hal diatas (Ajzen, 2005).

Dalam hal penentuan sikap jika individu memiliki evaluasi terhadap perilaku akan menghasilkan konsekuensi positif maka individu akan cenderung bersifat

*favorable* terhadap perilaku tersebut, sebaliknya semakin individu memiliki evaluasi negatif maka akan cenderung bersikap *unfavorable* terhadap perilaku tersebut (Ajzen, 2005).

## 2. Norma subjektif (*Subjective norms*)

Ajzen (2005), mendefinisikan *subjective norm* (norma subjektif) sebagai persepsi seseorang mengenai tekanan yang dihadirkan lingkungan sekitarnya guna menentukan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku. Norma subjektif merupakan fungsi dari keyakinan-keyakinan normatif (*normative belief*) yang memberikan representasi persepsi individu terhadap orang-orang yang terdekat dan dianggap penting (*significant other*) mengenai apakah orang tersebut sebaiknya terlibat dalam perilaku tertentu atau tidak didukung oleh motivasi individu guna memunculkan perilaku tertentu yang sesuai dengan ekspektasi orang-orang terdekat (Conner & Norman, 2003).

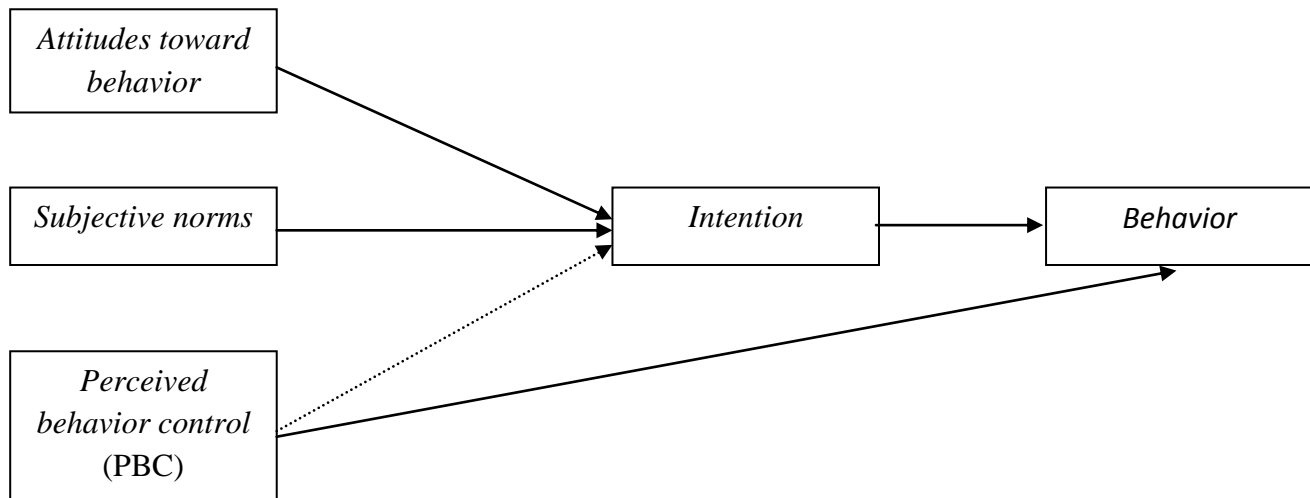
## 3. Persepsi individu terhadap kontrol atas perilaku (*Perceived behavioral control*)

Ajzen (2005), memberikan definisi terkait persepsi pengendalian diri sebagai fungsi yang didasarkan pada *belief* individu yang sering disebut sebagai *control beliefs*, yang didefinisikan sebagai *belief* individu mengenai ada atau tidaknya faktor yang akan mendukung ataupun menghalangi individu dalam memunculkan sebuah perilaku. *Belief* ini hadir berdasarkan pengalaman terdahulu individu tentang perilaku tertentu, informasi yang didapatkan ini dilakukan dengan cara observasi pada pengetahuan yang dimiliki diri sendiri maupun referensi dari orang lain yang

dikenal individu. Di satu sisi terdapat beberapa faktor lain yang juga mempengaruhi meningkatnya ataupun menurunnya perasaan individu mengenai tingkat kesulitan individu dalam melakukan suatu perilaku.

Dalam hal ini pertimbangan melakukan suatu perilaku tergantung pada seberapa banyak faktor pendukung (dan sedikit faktor penghambatnya, maka individu akan memiliki kontrol lebih besar yang dia rasakan atas perilaku tersebut dan begitu juga sebaliknya, semakin rendah individu merasakan faktor pendukung dan banyak faktor penghambat, maka individu cenderung akan mempersepsikan dirinya sulit untuk melakukan suatu perilaku (Ajzen, 2005).

Ajzen (1991), juga menuturkan bahwa ketiga determinan ini memiliki sifat yang independen, karena hubungan yang dimiliki akan mendapatkan hasil pengaruh yang berbeda tiap individu. Semisal pada seseorang ditemukan bahwa determinan sikap terhadap perilaku memiliki pengaruh yang signifikan daripada yang lainnya, akan tetapi pada individu lainnya justru determinan sikap terhadap perilaku kurang dapat memberikan hasil signifikan dalam mempengaruhi intensi seseorang.



**Gambar 2.1** Diagram *Theory of Planned Behavior* (TPB) (Ajzen, 1975).

#### **2.4. Hubungan Antara *Theory of Planned Behavior* dan Intensi Melakukan Kegiatan *Cyberactivism* pada Mahasiswa Aktifis**

Intensi *cyberactivism* merupakan keinginan seseorang untuk melakukan aksi politik ataupun gerakan aktivisme secara sadar dengan tujuan tertentu melalui media digital dan internet. Dalam berjalannya kegiatan *cyberactivism* dapat diawali melalui diskusi, penyampaian pendapat, memprotes, memberikan ajakan untuk berkumpul, bertukar informasi dan membagikan dokumentasi gerakan yang dilakukan (Gaby & Caren, 2012; Palfrey & Gasser, 2008; Prensky 2001; Sullivan, 2009), semua kegiatan diatas dilakukan dengan sadar dan terorganisir dengan baik.

Kesadaran bersama akan suatu hal menjadi langkah awal yang diperlukan untuk tindakan publik yang nyata. Pada titik ini sentimen dari orang-orang yang memiliki kesadaran terkait suatu hal yang dianggap salah akan tersebar luas, akan



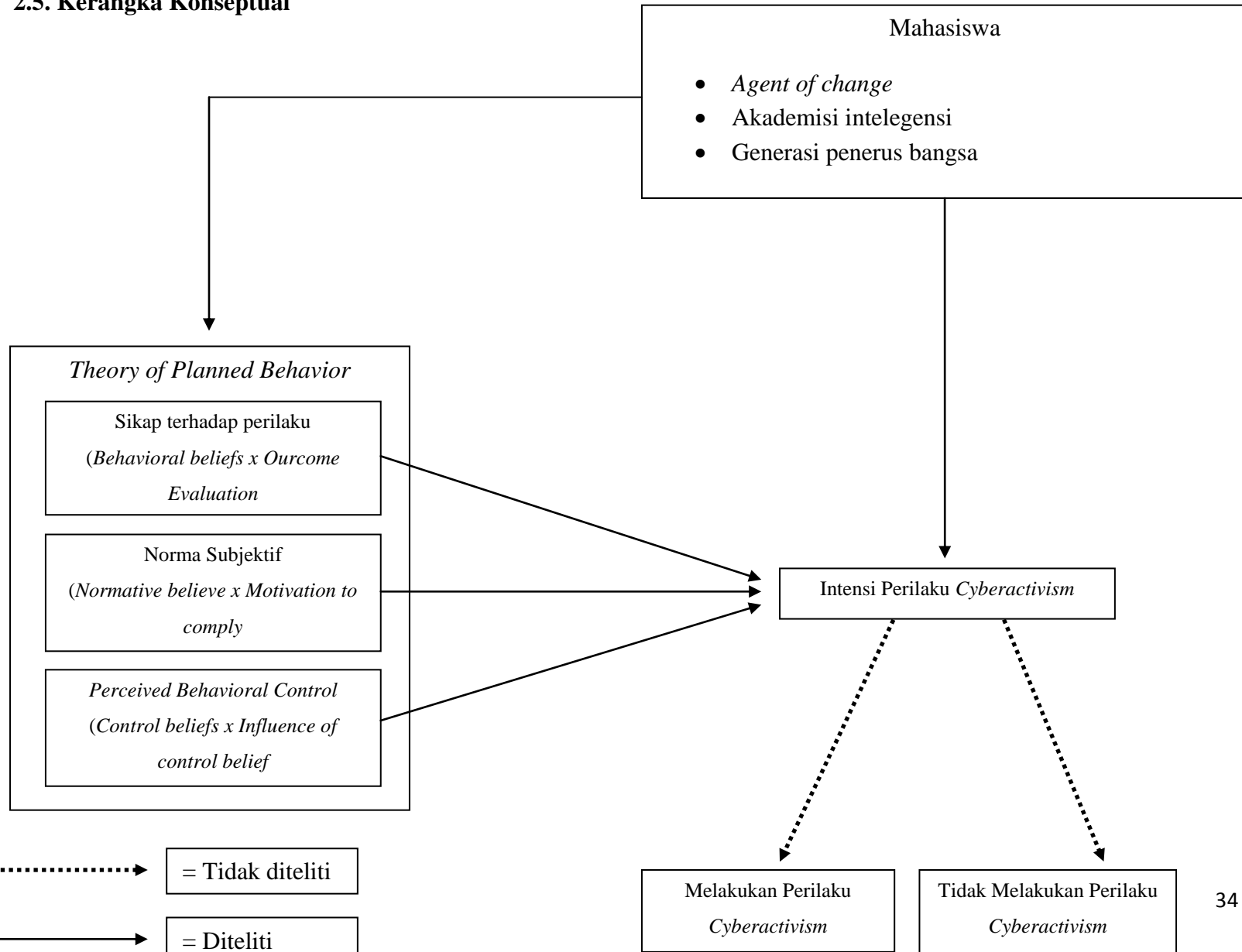
tetapi karena tidak ada yang bersuara pada akhirnya sentimen ini tidak akan dianggap penting orang pemerintahan. Intensi *cyberactivism* akan muncul ketika gerakan yang dilakukan tidak mendapat tanggapan dari pihak terkait. Para pemrotes memiliki cara lain untuk melakukan protes tanpa di ganggu pemerintah dan memiliki dampak yang lebih masif, yaitu dengan membagikan dokumentasi-dokumentasi pada saat gerakan dijalankan. Alat-alat digital dapat digunakan dalam segala hal untuk melakukan koordinasi dan menjaga keseimbangan kekuatan kelompok itu sendiri (Shirky, 2008).

Kemunculan intensi *cyberactivism* juga datang dari mudahnya akses dalam dunia digital yang mampu memberikan kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Dalam dunia digital sebagai bentuk pers baru seseorang dapat mempublikasikan segala hal secara online dan terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia. Sejalan dengan hal ini kebebasan berbicara sekarang menjadi kebebasan pers dan kebebasan pers adalah kebebasan untuk berkumpul (Shirky, 2008)

Sebuah model teori yang penulis anggap mampu memprediksi munculnya perilaku ini adalah *theory of planned behavior* (TPB) yang mana digunakan untuk mampu memprediksi perilaku individu. Ajzen (1991), menjelaskan bahwa faktor inti dari TPB adalah intensi dari individu guna memunculkan perilaku tertentu. Ajzen (1991), menyebutkan bahwa model ini terdiri atas tiga prediktor, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*) yang mampu ditunjukkan dengan peristiwa *Minsk's Oktyabrskaya Square* (Shirky, 2008), norma subjektif (*subjective norms*) dapat digambarkan dengan data terkait besarnya pengguna internet di Indonesia

(Datereportal, 2019), dan *perceived behavioral control* (PBC) bisa digambarkan oleh bagaimana mudahnya menyebarkan serta memberikan informasi yang sudah ada di media sosial.

**2.5. Kerangka Konseptual**



## 2.6. Hipotesis

Berdasarkan uraian yang sudah penulis jabarkan, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Ha1: *attitude toward behavior* mampu memprediksi intensi *cyberactivism*.
2. Ha2: *subjective norms* mampu memprediksi intensi *cyberactivism*.
3. Ha3: *perceived behavioral control* mampu memprediksi intensi *cyberactivism*.